



Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum

Ega Ananda

anandaega189@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *anandaega189@gmail.com*

Abstract. Legislation is one of the important elements in the legal system that aims to create a just, orderly, and regular governance of society. This process involves basic principles such as legality, clarity, and accountability which are the main guidelines in producing quality legal norms. In addition, the application of appropriate methods, such as legal drafting, comparative legal analysis, participatory approaches, and regulatory impact analysis, is very important to ensure the relevance of laws to the needs of society. In the context of globalization, harmonization of national laws with international laws is also an unavoidable aspect. The implementation of legislation must be accompanied by effective education and supervision to ensure its compliance with the initial objectives. Therefore, the technique of making legislation not only functions as an administrative process, but also as a tool to achieve justice and social welfare. Learning and development of this technique must continue to be carried out in line with the developing social, political, and economic dynamics.

Keywords: Legislation, Legal Principles, Legal Methods

Abstrak. Pembuatan perundang-undangan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan tata kelola masyarakat yang adil, tertib, dan teratur. Proses ini melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, kejelasan, dan akuntabilitas yang menjadi pedoman utama dalam menghasilkan norma hukum berkualitas. Selain itu, penerapan metode yang tepat, seperti legal drafting, analisis hukum perbandingan, pendekatan partisipatif, dan analisis dampak regulasi, sangat penting untuk memastikan relevansi undang-undang dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional juga menjadi aspek yang tidak terhindarkan. Implementasi perundang-undangan harus diiringi dengan edukasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan awal. Oleh karena itu, teknik pembuatan perundang-undangan bukan hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran dan pengembangan teknik ini harus terus dilakukan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.

Kata kunci: Pembuatan Perundang-Undangan, Prinsip Hukum, Metode Hukum

LATAR BELAKANG

Pembuatan perundang-undangan merupakan salah satu elemen vital dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan tata kelola masyarakat yang adil, tertib, dan teratur. Proses ini tidak hanya mencakup penyusunan norma hukum, tetapi juga mencerminkan kepentingan negara dan masyarakat dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, teknik pembuatan perundang-undangan menjadi alat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan akan undang-undang yang responsif dan adaptif terhadap perubahan menjadi semakin mendesak (Muhaimin et al., 2020).

Prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan perundang-undangan, seperti legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, menjadi pedoman utama dalam menghasilkan norma hukum yang berkualitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari potensi bias, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat luas. Selain itu,

pembuatan perundang-undangan harus mempertimbangkan nilai-nilai etika, budaya, dan tradisi lokal, sehingga hukum yang dihasilkan mampu diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat yang beragam. Metode yang digunakan dalam proses pembuatan perundang-undangan juga memiliki peranan yang krusial. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, drafting (penyusunan naskah), hingga pengesahan dan implementasi. Setiap tahapan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda, yang mencakup analisis data, konsultasi publik, serta harmonisasi dengan hukum-hukum lain yang berlaku. Pendekatan yang baik akan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga efisien dalam pelaksanaannya (Qamar et al., 2020).

Implementasi perundang-undangan seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama di negara dengan pluralitas budaya dan tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teknik pembuatan perundang-undangan harus mencakup aspek edukasi dan penyuluhan hukum, agar masyarakat tidak hanya memahami substansi hukum tetapi juga termotivasi untuk mematuhi. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Dalam era globalisasi, teknik pembuatan perundang-undangan juga harus mampu menjawab tantangan internasional. Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional menjadi aspek yang tak terhindarkan, terutama dalam menghadapi isu-isu global seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu memiliki wawasan yang luas dan memahami dinamika global untuk menghasilkan produk hukum yang relevan dengan konteks internasional (Achir, 2020).

Dengan demikian, teknik pembuatan perundang-undangan bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga mencerminkan visi dan misi negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penguasaan terhadap prinsip, metode, dan implementasi yang baik dalam teknik ini merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembelajaran dan pengembangan teknik pembuatan perundang-undangan perlu terus dilakukan, seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis tentang teknik pembuatan perundang-undangan bertumpu pada pemahaman mengenai dasar-dasar hukum yang melandasi proses penyusunan norma hukum. Salah satu teori utama yang relevan adalah teori hukum positivis, yang menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara tegas dan jelas, sehingga dapat dipatuhi oleh semua pihak. Dalam konteks ini, perundang-undangan dianggap sebagai manifestasi nyata dari kehendak negara yang dituangkan dalam bentuk aturan yang mengikat. Pandangan ini membantu pembuat undang-undang dalam menentukan kerangka kerja yang logis dan terstruktur. Selain teori hukum positivis, teori hukum naturalis juga memiliki kontribusi penting dalam pembuatan perundang-undangan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan keadilan universal. Dalam praktiknya, pendekatan naturalis mendorong pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, undang-undang yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar legalitas tetapi juga legitimasi moral yang kuat (Zuraida, 2022).

Teori tentang legitimasi hukum juga menjadi salah satu fondasi penting dalam pembuatan perundang-undangan. Legitimasi ini diperoleh melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi publik, konsultasi, dan pengambilan keputusan secara transparan. Dengan adanya legitimasi yang kuat, undang-undang memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan dihormati

oleh masyarakat. Oleh karena itu, teknik pembuatan perundang-undangan harus memastikan adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Dalam kerangka teoritis, konsep harmonisasi hukum juga menjadi fokus utama. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, pembuat undang-undang dapat menghasilkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan kewajiban internasional suatu negara. Hal ini penting dalam era globalisasi, di mana isu-isu lintas negara semakin memengaruhi dinamika hukum di tingkat lokal (Priyanto, 2019).

Teori tentang efektivitas hukum memberikan panduan mengenai bagaimana undang-undang dapat diimplementasikan secara optimal. Efektivitas hukum bergantung pada kualitas perundang-undangan itu sendiri, mulai dari kejelasan bahasa hukum, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, hingga ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, teknik pembuatan perundang-undangan harus mencakup aspek perencanaan implementasi yang matang. Kajian teoritis tentang teknik pembuatan perundang-undangan tidak terlepas dari peran teknologi dan inovasi dalam mendukung proses hukum. Dengan perkembangan teknologi informasi, proses penyusunan undang-undang dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui penggunaan perangkat lunak khusus, database hukum, dan platform digital untuk konsultasi publik. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan proses, tetapi juga memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu terus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi produk hukum yang dihasilkan (Alhakim et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang bersifat deskriptif dan analitis. Dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan teori yang relevan dengan teknik pembuatan perundang-undangan, termasuk landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasarinya. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan, seperti teori hukum positivis, hukum naturalis, legitimasi hukum, dan harmonisasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan teori yang telah ada, serta metode induktif, yaitu mengembangkan pemahaman baru berdasarkan fenomena atau konteks tertentu yang relevan. Hasil dari kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mendukung argumentasi ilmiah dan rekomendasi yang diajukan terkait teknik pembuatan perundang-undangan yang efektif, responsif, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Teknik Pembuatan Perundang-Undangan Dapat Diterapkan Untuk Menghasilkan Produk Hukum Yang Efektif Dan Berkeadilan

Prinsip-prinsip dasar dalam teknik pembuatan perundang-undangan, seperti legalitas, kejelasan, dan akuntabilitas, memainkan peran penting dalam memastikan kualitas produk hukum. Legalitas menekankan bahwa setiap undang-undang harus memiliki dasar kewenangan yang sah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menghindari konflik norma dan memastikan bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan adanya prinsip legalitas, undang-undang dapat

dijalankan tanpa keraguan akan keabsahannya, menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kejelasan adalah prinsip lain yang esensial dalam pembuatan perundang-undangan. Kejelasan terkait dengan penggunaan bahasa hukum yang lugas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Bahasa yang ambigu atau terlalu teknis dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga mengurangi efektivitas implementasi hukum. Untuk mengatasi hal ini, drafting hukum harus melibatkan ahli bahasa dan hukum guna memastikan keselarasan terminologi dan logika hukum dalam peraturan yang dibuat (Awangga, 2020).

Akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam pembuatan perundang-undangan. Proses penyusunan undang-undang harus transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Partisipasi publik melalui konsultasi, dengar pendapat, atau forum diskusi memungkinkan pembuat undang-undang untuk memahami kebutuhan nyata masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, undang-undang yang dihasilkan dapat memperoleh legitimasi yang lebih tinggi karena mencerminkan aspirasi bersama. Selain prinsip-prinsip tersebut, keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dalam setiap undang-undang. Dalam konteks ini, undang-undang tidak hanya harus bersifat universal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan atau minoritas. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan ketentuan yang melindungi hak-hak dasar dan menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk mencapai kesetaraan di tengah-tengah keberagaman sosial (Estryana, 2022).

Efektivitas undang-undang bergantung pada kesesuaian antara norma yang dirumuskan dengan realitas sosial. Prinsip efektivitas dapat diwujudkan melalui studi awal yang komprehensif, yang mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu undang-undang. Hasil studi ini harus menjadi dasar dalam perumusan pasal-pasal hukum, sehingga undang-undang yang dibuat tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif di lapangan. Penerapan prinsip-prinsip dasar dalam teknik pembuatan perundang-undangan juga membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang kontinu. Setelah undang-undang disahkan, perlu dilakukan penilaian terhadap implementasinya untuk memastikan apakah tujuan hukum tercapai atau tidak. Jika ditemukan kekurangan atau hambatan, revisi dan penyesuaian dapat dilakukan. Dengan demikian, teknik pembuatan perundang-undangan yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar akan menghasilkan produk hukum yang relevan, responsif, dan berkeadilan (Muhaimin et al., 2020).

Metode Yang Digunakan Dalam Pembuatan Perundang-Undangan, Dan Bagaimana Metode Tersebut Dapat Meningkatkan Kualitas Serta Relevansi Undang-Undang Dengan Kebutuhan Masyarakat

Dalam pembuatan perundang-undangan, metode yang digunakan mencakup beberapa pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan norma hukum yang efektif dan relevan. Salah satu metode utama adalah *legal drafting*, yaitu teknik penyusunan teks hukum yang terstruktur dan sistematis. Dalam proses ini, penyusun undang-undang harus memahami dengan baik dasar hukum, prinsip, serta hierarki peraturan yang berlaku. Legal drafting memerlukan keterampilan untuk menggunakan bahasa hukum yang jelas dan tepat, yang dapat dipahami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Metode berikutnya adalah *comparative legal analysis* atau analisis hukum perbandingan. Dalam metode ini, pembuat undang-undang mempelajari sistem hukum dari negara lain sebagai referensi atau pembanding. Teknik ini sering digunakan untuk menghasilkan peraturan yang relevan dengan dinamika global atau memperbaiki kelemahan dalam hukum nasional. Misalnya, hukum lingkungan internasional dapat menjadi inspirasi bagi

negara-negara dalam menyusun kebijakan perlindungan lingkungan domestik (Elcaputera et al., 2022).

Selain itu, *participatory approach* atau pendekatan partisipatif menjadi salah satu metode yang semakin populer. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, seperti melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau uji publik, memungkinkan pembuat undang-undang untuk memahami kebutuhan nyata masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi undang-undang tetapi juga memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama. Metode lain yang digunakan adalah *impact assessment* atau analisis dampak regulasi. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi potensi konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari peraturan yang akan diberlakukan. Dengan metode ini, pembuat undang-undang dapat mengidentifikasi risiko serta manfaat dari suatu regulasi sebelum diimplementasikan. Hal ini memastikan bahwa undang-undang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan sesuai dengan kondisi di lapangan (Qamar et al., 2020).

Teknik *evidence-based lawmaking* juga menjadi metode yang semakin penting. Dalam metode ini, keputusan legislatif didasarkan pada data dan bukti empiris yang akurat. Misalnya, dalam membuat kebijakan kesehatan, data epidemiologi atau hasil penelitian medis dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas regulasi. Pendekatan ini membantu pembuat undang-undang untuk merancang kebijakan yang lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan metode ini saling melengkapi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas serta relevansi undang-undang dengan kebutuhan masyarakat. Kombinasi antara analisis teoritis, partisipasi publik, dan data empiris memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga sesuai dengan dinamika sosial dan aspirasi publik. Dengan menerapkan metode-metode ini secara konsisten, pembuat undang-undang dapat menghasilkan regulasi yang berdaya guna dan mendukung pembangunan yang berkeadilan (Sihombing et al., 2023).

Harmonisasi Hukum Nasional Dengan Hukum Internasional Dapat Diwujudkan Dalam Teknik Pembuatan Perundang-Undangan, Khususnya Dalam Menghadapi Isu-Isu Global

Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional merupakan kebutuhan mendesak dalam era globalisasi, di mana berbagai isu lintas batas seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia membutuhkan respons yang terintegrasi. Harmonisasi ini dapat diwujudkan dengan mengacu pada prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Dalam pembuatan perundang-undangan nasional, prinsip ini diterapkan dengan cara menyelaraskan norma hukum domestik dengan kewajiban internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Proses harmonisasi dimulai dengan mengadopsi standar internasional ke dalam peraturan nasional. Standar ini dapat berasal dari traktat, konvensi, atau rekomendasi organisasi internasional seperti PBB, WTO, atau WHO. Sebagai contoh, ratifikasi Konvensi Paris tentang Perubahan Iklim mengharuskan negara untuk memasukkan target pengurangan emisi karbon ke dalam undang-undang nasional. Teknik ini memastikan bahwa hukum nasional tidak hanya sesuai dengan norma internasional tetapi juga mendukung agenda global yang lebih besar (Estryana, 2022).

Pentingnya *comparative legal analysis* dalam harmonisasi hukum tidak dapat diabaikan. Analisis ini memungkinkan pembuat undang-undang untuk mempelajari implementasi hukum internasional di negara lain dan menyesuaikannya dengan konteks domestik. Proses ini membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan mencegah konflik norma antara hukum nasional dan internasional. Sebagai contoh, adopsi standar internasional tentang perlindungan data pribadi

dapat disesuaikan dengan struktur sosial, budaya, dan sistem hukum yang ada di suatu negara. Harmonisasi juga dapat dicapai melalui mekanisme inkorporasi langsung atau transformasi norma internasional. Dalam pendekatan inkorporasi, ketentuan hukum internasional dimasukkan secara langsung ke dalam perundang-undangan nasional. Sebaliknya, pendekatan transformasi melibatkan penyesuaian norma internasional dengan sistem hukum nasional. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum nasional dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum global (Zuraida, 2022).

Tantangan utama dalam harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan internasional dan kepentingan nasional. Pembuat undang-undang harus memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional tidak merugikan kedaulatan negara atau bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, partisipasi pemangku kepentingan nasional, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, sangat penting dalam proses legislasi. Pada akhirnya, harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional memerlukan komitmen politik yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan pemahaman mendalam tentang norma internasional. Dengan mengintegrasikan standar internasional ke dalam teknik pembuatan perundang-undangan, negara dapat memainkan peran aktif dalam menghadapi isu-isu global sambil melindungi kepentingan domestik. Harmonisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas hukum nasional tetapi juga memperkuat posisi negara dalam komunitas internasional (Awangga, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembuatan perundang-undangan merupakan proses yang sangat penting dalam sistem hukum untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Teknik pembuatan perundang-undangan harus mengutamakan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, kejelasan, akuntabilitas, dan keadilan, serta mempertimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini penting untuk menghasilkan produk hukum yang efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Selain itu, metode-metode seperti legal drafting, analisis hukum perbandingan, pendekatan partisipatif, dan analisis dampak regulasi perlu diterapkan untuk memastikan relevansi dan kualitas undang-undang. Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional juga menjadi tantangan penting yang harus dihadapi dalam konteks globalisasi, terutama terkait dengan isu-isu lintas batas. Oleh karena itu, pembuat undang-undang harus memiliki wawasan luas, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi agar dapat menghasilkan produk hukum yang sah, diterima, dan efektif.

Saran

1. Peningkatan Keterlibatan Publik: Proses pembuatan perundang-undangan perlu lebih melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik dan forum diskusi, untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan publik.
2. Peningkatan Kualitas Bahasa Hukum: Penyusunan naskah hukum perlu memperhatikan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.
3. Integrasi Teknologi dalam Penyusunan Hukum: Pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital untuk konsultasi publik dan analisis hukum dapat mempercepat proses pembuatan perundang-undangan dan memperluas partisipasi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Achir, N. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jambura Law Review*. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/5239>
- Alhakim, A., & Ginting, E. (2021). ... Undang-Undang Cipta Kerja Pada Tahapan Perencanaan Dan Penyusunan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Combines-Conference On Management* <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4454>
- Awangga, A. (2020). *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qMcMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=teknik+pembuatan+%22perundang+undangan%22&ots=0JgmSwXKEk&sig=02Tu8W DjbkcOjD25pL3bye6LhwE>
- Elcaputera, A., Wali, A., & Wirya, A. (2022). ... Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka In *Jurnal Ilmu Hukum*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/dtdheekh3na7jkbxzis2r6pca/access/wayback/https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/8236/pdf>
- Estryana, P. P. (2022). Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Locus Delicti*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/view/1610>
- Muhaimin, M., Djumardin, D., & ... (2020). Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha. *Jurnal Risalah* <http://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/3>
- Priyanto, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan Oleh. In *Jurnal Idea Hukum*. pdfs.semanticscholar.org. <https://pdfs.semanticscholar.org/8da9/50b30117de720397bb2062cc139c5516a665.pdf>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ISbRDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=teknik+pembuatan+%22perundang+undangan%22&ots=H5XjQY0Qjn&sig=ODnkpFB1 BiIzSit0rSB0FDJhbqg>
- Sihombing, D. L., Nasution, B., & ... (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep* <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/38>
- Zuraida, S. H. I. (2022). *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Y26CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teknik+pembuatan+%22perundang+undangan%22&ots=zGiSyb6Jyo&sig=koh26bdoaRy -ITwwwc_DdPjvFBM